

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN SEKTOR UMKM OLEH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

OLEH :

JULIA NANDA KARTIKA
NIM : 1705906010013



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN SEKTOR UMKM OLEH BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH :

JULIA NANDA KARTIKA
NIM : 1705906010013



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 23 September 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Strata I (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Julia Nanda Kartika

NIM : 1705906010013

Dengan judul : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:
Pembimbing

Leli Putri Ansari, S.E., M.Si.
NIDN. 0024077812

Mengetahui:



Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si.
NIP. 196002121989031003

Tanggal Lulus : 23 September 2021



Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si.
NIDPPK. 197411052021211002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59 Telp.: 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 23 September 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menyetujui skripsi saudara :

Nama : Julia Nanda Kartika

NIM : 1705906010013

Dengan judul : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada Tanggal 23 September 2021

Menyetujui

Komisi Ujian

1. Ketua Sidang : Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si.
2. Sekretaris : Leli Putri Ansari, S.E., M.Si.
3. Anggota : Mahrizal, S.E., M.Si.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si
NI PPPK. 197411052021211002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Nanda Kartika

NIM : 1705906010013

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh” ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku, atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Meulaboh, 27 September 2021
Saya yang membuat pernyataan,



Julia Nanda Kartika
1705906010013

PERSEMBAHAN

Yang paling utama segala syukur dan sembah sujud kepada Allah SWT. Atas kasih sayang –Mu serta segala berkah rahmat untukku. Atas karunia ilmu, ridha, serta kekuatan atas kuasa-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan atas keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada semua orang yang amat sangat kusayangi dan terkasih.

Karino dan Saridah

Sebagai tanda kasih, tanda bakti, serta rasa syukur juga terima kasih yang tidak terhingga Julia persembahkan karya ini untuk ayah dan ibu yang memberikan do'a paling tulus, sayang dan kasih paling dalam, pengorbanan paling keras, serta aamiin yang tak pernah terputus yang tidak terbalaskan dan tak mungkin terbalaskan dengan apapun yang ada di Dunia. Dengan sebit dalam lembar kata cinta persembahan ini semoga ini menjadi langkah awal atas ridha Allah untuk tetap terus membahagiakan serta membanggakan ayah dan ibu. Aamiin Yarabbal Alamin.

Kakak dan Adik

Teruntuk kakak Nurvita Agustin Alda, S.Pd dan adik Gigih Nurul Andrea Putri, tumbuh bersama, berbagi kasih, berjuang hidup bersama, senang, tangis, pertengkaran, merupakan hal kecil yang selalu menjadi pelengkap rasa syukur, bentuk kebahagiaan dalam rumah yang tidak tergantikan di tempat lain dan dengan siapapun. Terima kasih atas doa, semangat dan rasa sayang selama ini.

Dosen Pembimbing

Untuk seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Pembangunan terutama untuk pembimbing saya ibu Leli Putri Ansari, S.E., M.Si yang selalu memberikan beribu arahan, waktu luang, bantuan dan perhatiannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

My Partner & Sahabat

Untuk Rizki Vadli, S.I.kom terima kasih sudah menemani Julia, membantu dengan ikhlas, mencari referensi dan perhatian, doa juga dukungan. Terima kasih beberapa tahun sudah menjadi hal terdekat setelah keluarga, menjadi orang baik dalam segala hal. Semoga allah selalu memberikan kemudahan langkah serta mewujudkan segala keinginan, dan mendengarkan segala doa. Aamiin

Untuk Nurrijah, S.E & Rozah Liana, S.E yang menjadi keluarga, sahabat dan penyemangat sampai akhir, berbagi tempat teduh, berbagi bantal, berbagi cerita. Kalian orang baik semoga allah membahagiakan kalian, untuk segala susah hidup, untuk segala rasa sakit semoga menjadi kenangan.

JULIA NANDA KARTIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmad, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini. Kemudian shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini berjudul *“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh”* dan disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata-1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, do'a, nasihat serta kasih sayang tiada batas yang selalu tercurah untuk keberhasilan penulis selama ini.
2. Ibu Leli Putri Ansari, S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan semangat, arahan dan bantuan dalam penyelesaian penyusunan juga penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, S.E., MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

5. Bapak Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
6. Bapak Dr. Saiful Badli, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
7. Segenap dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh Civitas akademika Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
9. Teman-teman angkatan 2017 seperjuangan dengan penulis yang telah memberikan motivasi, semangat juga kerja samanya selama perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Meulaboh, 27 September 2021

Penulis,



Julia Nanda Kartika

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama : Julia Nanda Kartika
NIM : 1705906010013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Umkm Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Meulaboh, 23 September 2021
Yang Menyatakan



Julia Nanda Kartika
1705906010013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang merupakan data *time series* mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2020 (60 bulan) tentang pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh BPRS Provinsi Aceh, Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *E-views*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh BPRS Provinsi Aceh, JUB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh, dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh BPRS Provinsi Aceh. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa variabel DPK, JUB, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

Kata kunci: DPK, JUB, NPF, Pembiayaan UMKM.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the financing of the Micro Small and Medium Enterprises sector by Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) of Aceh Province. The type of data used in this study is quantitative which is time series data from January 2016 to December 2020 (60 months) regarding financing for the Micro Small and Medium Enterprises sector by the Aceh Province BPRS, Third Party Funds, Total Money Supply, and Non Performing Financing. This research uses multiple linear regression method with the help of E-views application. The data used in this study were sourced from Bank Indonesia (BI) and the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) of Aceh Province. The results of this study indicate that partially the DPK variable has a positive and significant effect on financing the Micro Small and Medium Enterprises sector by the Aceh Province BPRS, JUB has a positive and insignificant effect on the Micro Small and Medium Enterprises sector financing by the Aceh Province BPRS, and Non Performing Financing (NPF) has a negative but not significant effect on financing of the Micro Small and Medium Enterprises sector by the Aceh Province BPRS. Simultaneously, it shows that the DPK, JUB, and NPF variables have a positive and significant effect on financing the Micro Small and Medium Enterprises sector by the Aceh Province BPRS.

Keywords: *DPK, JUB, NPF, MSME Financing.*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	14
2.1.1 Pengertian UMKM.....	14
2.1.2 Kriteria UMKM	15
2.1.3 Hambatan UMKM	16
2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	17
2.2.1 Pengertian BPRS	17
2.2.2 Kegiatan dan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	17
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	20
2.3.1 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	20
2.3.2 Jumlah Uang Beredar (JUB)	23
2.3.3 <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	24
2.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga Dengan Pembiayaan UMKM	25
2.5 Hubungan Jumlah Uang Beredar Dengan Pembiayaan UMKM.....	25

2.6	Hubungan <i>Non Performing Financing</i> Dengan Pembiayaan UMKM .	26
2.7	Penelitian Terdahulu	27
2.8	Kerangka Pemikiran	30
2.9	Perumusan Hipotesis	30
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2	Data Penelitian.....	32
3.2.1	Jenis Dan Sumber Data	32
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3	Model Analisis Data	33
3.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda	33
3.3.2	Analisis Koefisien	34
3.3.3	Uji Parsial (Uji t).....	35
3.3.4	Uji Simultan (Uji F)	35
3.4	Pengujian Hipotesis	35
3.5	Uji Asumsi Klasik	37
3.5.1	Uji Normalitas.....	37
3.5.2	Uji Multikolinieritas.....	37
3.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	38
3.5.4	Uji Autokorelasi	38
3.6	Definisi Operasional Variabel	38
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	42
4.2.1	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh	44
4.2.2	Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) Provinsi Aceh.....	46
4.2.3	Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh	48
4.2.4	Perkembangan Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh	49
4.3	Hasil Pengujian Hipotesis.....	51
4.3.1	Hasil Regresi Linier Berganda.....	52
4.3.2	Koefisien Korelasi.....	53
4.3.3	Koefisien Determinasi.....	53

4.3.4 Uji t	53
4.3.5 Uji F	55
4.3.6 Uji Asumsi Klasik	56
4.4 Pembahasan dan Hasil	58
4.4.1 Analisis Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS Provinsi Aceh	58
4.4.2 Analisis Pengaruh JUB Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS Provinsi Aceh	59
4.4.3 Analisis Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS Provinsi Aceh	60
4.5 Kebijakan-Kebijakan Makro Ekonomi.....	61
4.5.1 Kebijakan Moneter	61
4.5.2 Kebijakan Fiskal.....	62
4.5.3 Kebijakan Segi Penawaran	62
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
BIODATA PENULIS.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
3.1 Penentuan Kekuatan Hubungan Berdasarkan Tingkat Korelasi.....	34
4.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Dan Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS Provinsi Aceh Tahun 2016-2020	43
4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)...	45
4.3 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah).....	47
4.4 Perkembangan Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (dalam persen)	48
4.5 Perkembangan Pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah).....	50
4.6 Deskriptif Statistik.....	51
4.7 Uji Regresi Linier Berganda.....	52
4.8 Hasil Uji Multikolinieritas.....	57
4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas	57
4.10 Hasil Autokorelasi	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020	4
1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.....	5
1.3 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.....	7
4.1 Diagram Uji Normalitas.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data log	70
2. Data Log Setelah Rho Test.....	72
3. Output Hasil Regresi	74
4. Titik Persentase Distribusi t (df =46-90).....	78
5. Titik Persentase Distribusi F, $\alpha = 0,05$ (5%).....	79
6. Foto Penelitian.....	80
7. Surat Balasan Penelitian.....	81
8. Biodata Penulis	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia yang memiliki keragaman disegala hal seperti keragaman suku bangsa, bahasa dan agama. Meskipun bukan negara islam, namun jumlah penduduk muslim di Indonesia sangatlah besar. Sebanyak 88 persen dari jumlah penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama islam. Penduduk muslim di Indonesia sebenarnya banyak terletak di Provinsi Aceh yang merupakan provinsi paling barat pulau Sumatera. Provinsi Aceh bahkan dijuluki dengan sebutan *Seuramo Mekkah* (Serambi Mekkah) dikarenakan sebanyak 98 persen masyarakat di provinsi tersebut beragama islam. Besarnya penduduk muslim di Provinsi Aceh inilah yang mendorong besarnya kebutuhan layanan jasa perbankan syariah terlebih semenjak diberlakukannya Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam Pasal 2 yang mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah serta akad keuangan di Aceh juga harus berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan qanun tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan bahwa Provinsi Aceh memiliki hak khusus atau istimewa untuk menyelenggarakan serta menjalankan pemerintahan daerahnya, serta memiliki kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat. Qanun tersebut membuat bank konvensional di Aceh mengonversikan portofolionya menjadi bank syariah. Sehingga sistem keuangan dan perbankan syariah di Indonesia

khususnya di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan memiliki naungan landasan hukum yang kuat guna menggerakkan roda perekonomian salah satunya melalui pemberdayaan sektor bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2019) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor kegiatan yang ikut berperan dalam membentuk tenaga kerja sebanyak 96,87 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia dan kontribusi UMKM di Indonesia tahun 2017 terhadap PDB mencapai besaran 60,34 persen. Sedangkan di Provinsi Aceh penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM sebesar 85 persen dari 2,3 juta lebih tenaga kerja Provinsi Aceh ditahun 2019.

Namun, dalam mengembangkan usahanya UMKM dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang timbul, umumnya permasalahan tersebut adalah kurangnya modal usaha. Pelaku UMKM tidak bisa hanya mengandalkan modal pribadi yang sifatnya terbatas. Maka diperlukan peranan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan untuk pengembangan dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satunya adalah keikutsertaan perbankan dalam menyalurkan dana kepada pihak UMKM sebagai pembiayaan usaha kegiatan tersebut.

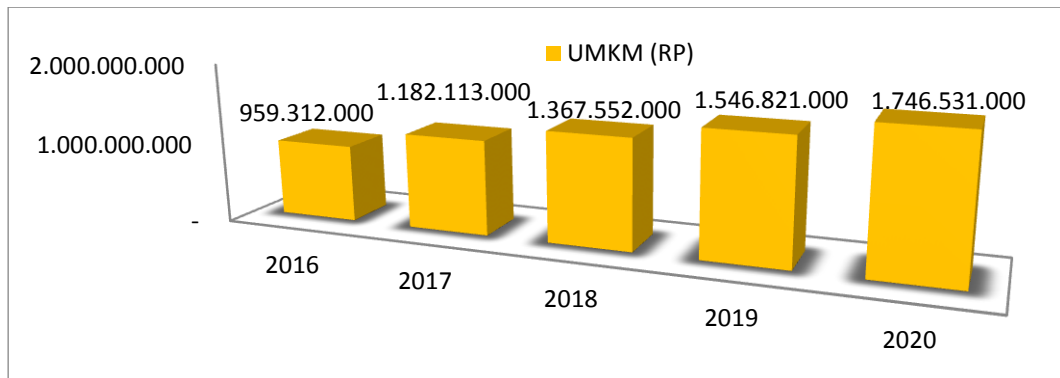
Kemudian Destiana (2016, hal. 16-17) mengatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi bank pilihan dalam membiayai kegiatan UMKM dikarenakan lebih mengutamakan kelayakan usaha UMKM dibandingkan melihat besarnya anggaran, selain itu dalam pembayaran pinjaman

juga dianggap tidak membebani pelaku UMKM pada kenaikan suku bunga karena menggunakan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil. Sifat religius masyarakat juga merupakan alasan yang mendorong dasar pemilihan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai pembiayaan usaha UMKM. Karena tidak bertentangan dengan ajaran dan ketentuan agama Islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Perbankan Syariah. Dan kegiatannya juga hampir sama dengan bank lainnya seperti menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998. Hingga tahun 2020 jumlah BPRS di Provinsi Aceh sebanyak 10 unit BPRS antara lain yaitu PT. BPRS Baiturrahman, PT. BPRS Tengku Chiek Dipante, PT. BPRS Hikmah Wakilah, PT. BPRS Rahma Hijrah Agung, PT. BPRS Gayo, PT. BPRS Adeco, PT. BPRS Kota Juang, PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera, PT. BPRS Serambi Mekkah, dan PT BPRS Oloan Ummah Sidempuan. Jumlah BPRS Provinsi Aceh pada tahun sebelumnya adalah 11 unit BPRS. Namun pada bulan Oktober 2019, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. BPRS Hareukat yang beralamat di Jl. Masjid No. 18, Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pencabutan izin usaha pada PT. BPRS Hareukat dikarenakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang telah kurang dari nol persen sejak bulan Maret 2018.

Berikut ini data pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh dapat dilihat pada Grafik 1.1 :

Grafik 1.1
Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2020

Dari data pada Grafik 1.1 di atas, besaran jumlah pembiayaan UMKM pertahun terus mengalami peningkatan. Total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS paling rendah terjadi tahun 2016 sebesar Rp.959.312.000. Sedangkan pembiayaan oleh BPRS paling besar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp.1.746.531.000. Peningkatan pembiayaan dari tahun ketahun merupakan eksistensi perbankan syariah yang terus berkembang di Provinsi Aceh. Dan peningkatan pembiayaan yang tinggi pada sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh tahun 2020 juga disebabkan oleh program serta upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS untuk sektor UMKM pertahun terus mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah UMKM pada BPRS Provinsi Aceh. Jumlah Nasabah UMKM BPRS Provinsi Aceh semula berjumlah 3.384 nasabah per desember 2016 menjadi 4.471 nasabah per desember 2020.

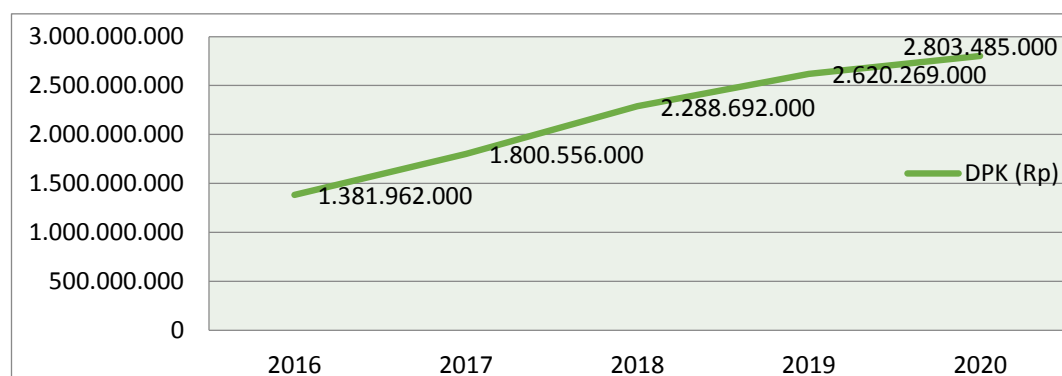
Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM jumlah UMKM di Provinsi Aceh pada tahun 2016 sebesar 75.207 unit dan terus mengalami peningkatan

pertahunnya hingga di tahun 2020 jumlah UMKM di Provinsi Aceh sebesar 212.632 unit. Penyebab peningkatan jumlah unit UMKM yang meningkat drastis ini adalah adanya program bantuan presiden masa kepemimpinan Joko Widodo untuk pelaku sektor UMKM sehingga masyarakat masing-masing daerah tertarik memulai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut Destiana (2016, hal. 17-18) kemampuan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter. Sedangkan faktor internalnya adalah terbatasnya permodalan bank syariah, profitabilitas yang belum optimal tercapai serta Dana Pihak Ketiga (DPK).

Adapun data perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh sebagai berikut:

Grafik 1.2
Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020.

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga BPRS Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan pertahun. Besaran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang

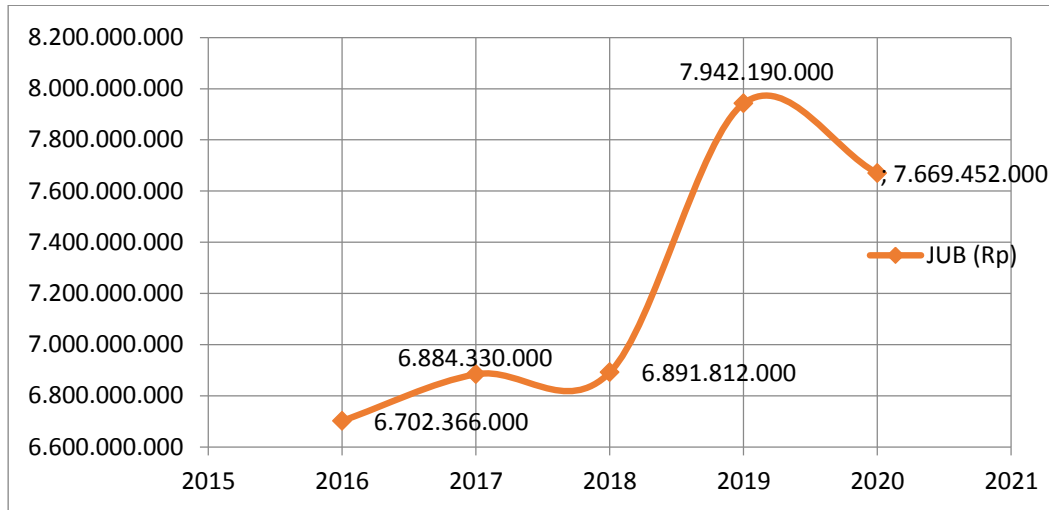
dihimpun oleh BPRS paling rendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp.1.381.962.000 sedangkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp.2.803.485.000. Peningkatan tersebut disebabkan oleh masyarakat yang mulai gemar menabung pada perbankan berbasis syariah dan juga pendapatan masyarakat yang bertambah. Peningkatan tersebut dapat disimpulkan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat kepada BPRS untuk menyimpan uang miliknya. Serta menunjukkan besarnya keyakinan masyarakat kepada BPRS bahwa pihak bank kompetitif dalam mengelola kegiatan keuangannya.

Tingkat minat dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah juga pernah diteliti oleh Mutia (2017, hal. 378-375) dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa praktek bank syariah telah dipersepsikan secara positif oleh masyarakat kota banda aceh dan diyakini bahwa keberadaannya mampu dijadikan sebagai tempat penyimpanan dana yang mereka miliki yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Selanjutnya dalam hasil penelitian juga dipaparkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap bank syariah oleh masyarakat Aceh mencapai 81,2 persen dari total 100 persen dengan kategori sangat setuju.

Dalam penelitian Rifai dkk (2017, hal. 15) menyatakan bahwa jumlah pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu Jumlah Uang Beredar (JUB).

Adapun data perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam arti luas (M2) di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Grafik 1.3 berikut ini:

Grafik 1.3
Jumlah Uang Beredar (JUB) di Provinsi Aceh
Tahun 2016-2020.



Sumber : Bank Indonesia Tahun 2020

Berdasarkan Grafik 1.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam arti sempit atau jumlah uang yang keluar dari Bi Provinsi Aceh terus mengalami perubahan yang fluktuatif pertahun. Jumlah Uang Beredar (JUB) terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp.6.702.366.000. Sedangkan Jumlah Uang Beredar (JUB) tertinggi terjadi pada pada tahun 2019 sebesar Rp.7.942.190.000. Kenaikan JUB yang signifikan terjadi mulai tahun 2016-2018 yang disebabkan oleh konsumsi masyarakat Provinsi Aceh yang semakin tinggi dan tak terbatas. Namun kenaikan drastis JUB terjadi pada tahun 2019 dengan penyebab kenaikannya adalah mulai ada program bantuan pemerintah untuk membiayai kegiatan UMKM dimasa pandemi COVID-19 agar para pelaku UMKM tetap produktif dan tidak kehilangan sumber pendapatannya dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga masyarakat cenderung memegang uang tunai yang memicu tingginya Jumlah Uang Beredar (JUB) pada tahun tersebut. Hingga tahun 2020 total JUB masih besar namun lebih rendah

dibandingkan tahun 2019 dikarenakan kebijakan pembiayaan UMKM oleh pemerintah telah menetapkan persyaratan baru yang memperketat seleksi kelolosan pembiayaan sektor UMKM.

Variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi jumlah pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS adalah rasio kredit bermasalah atau NPF. Menurut Roy (2020, hal. 17) terdapat resiko pada proses berjalannya pembiayaan oleh BPRS yakni adanya ketidاكلancaran mitra atau nasabah dalam melakukan kewajibannya, atau istilah lain dikenal dengan sebutan *Non Performing Financing* (NPF).

Tabel 1.1
Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

No.	Tahun	NPF (%)
1	2016	7,93
2	2017	10,28
3	2018	11,18
4	2019	9,71
5	2020	7,20
Rata-rata		9,26

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020.

Pada Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah rasio kredit bermasalah atau NPF pertahun menunjukkan kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda, dengan jumlah rata-rata NPF terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 7,20 persen. Sedangkan NPF tertinggi terjadi pada kuartal kedua tahun 2018 yakni sebesar 11,18 persen. Peningkatan rata-rata persentase NPF terus terjadi mulai tahun 2016-2018. Tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah rata-rata rasio kredit bermasalah paling tinggi terjadi terhadap jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan oleh kinerja perbankan yang belum optimal dan cenderung menurun dalam menyaring kriteria UMKM yang sehat serta penurunan pendapatan pelaku UMKM penerima pembiayaan dari BPRS yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Akibat kurang optimal produktivitas UMKM tersebut sehingga tidak mampu membayar angsuran kewajiban atas pembiayaan yang telah diterima. Namun pada tahun 2019-2020 rata-rata NPF terus mengalami penurunan yang disebabkan adanya penambahan modal usaha atau pembiayaan UMKM oleh pemerintah yang membuat pelaku UMKM memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan usaha sehingga dapat membayar angsuran kewajiban kepada BPRS. Penurunan rata-rata NPF yang terjadi juga disebabkan oleh pencabutan izin usaha salah satu BPRS di Aceh yang memiliki likuiditas bermasalah yaitu BPRS Hareukat pada bulan Oktober 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan izin usaha dan hilangnya BPRS tersebut dari daftar jumlah BPRS yang ada di Provinsi Aceh secara otomatis juga mengurangi jumlah rata-rata NPF pertahun.

Berdasarkan uraian dan fakta yang telah dipaparkan, peneliti tertarik menganalisis pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh. Peneliti akan memfokuskan pada variabel dana pihak ketiga, jumlah uang beredar dan *non performing financing* sebagai variabel independen dengan penelitian ini yang berjudul, **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh?
- b. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh?
- c. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh?
- d. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini berdasarkan pada rumusan masalah yang ada yaitu :

- a. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.
- b. Menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.

- c. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.
- d. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis skripsi ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan yang kemudian sebagai bahan perbandingan sampai sejauh mana teori yang didapatkan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Teuku Umar pada Fakultas Ekonomi dan diterapkan secara nyata di lapangan.

Bagi akademik skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang mendorong wawasan, menambah pengetahuan dan sumber informasi yang bermanfaat. Juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) dalam mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan yaitu pemerintah, pihak perbankan dan otoritas jasa keuangan dalam mengambil keputusan

yang tepat dan strategis berhubungan dengan pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.

- b. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat khususnya di Provinsi Aceh tentang peran Jumlah Uang Beredar (JUB), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) dalam mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas :

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua merupakan tinjauan pustaka dari penelitian ini yang menguraikan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS, Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis.

Bagian ketiga merupakan metode penelitian yang membahas tentang ruang lingkup penelitian, data penelitian, model analisis data, pengujian hipotesis, uji asumsi klasik, dan definisi operasional variabel penelitian.

Bagian keempat merupakan hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis yang meliputi hasil regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F, uji asumsi klasik dan pembahasan atau

uraian hasil analisis serta penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan makroekonomi.

Bagian kelima merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah kelompok usaha produktif dalam ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan maupun badan usaha tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008.

Menurut Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) merupakan entitas usaha yang mempunyai total kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp.200.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan mempunyai total penjualan pertahun paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000. Sementara itu, yang dimaksud dengan Usaha Menengah (UM) adalah entitas usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai total kekayaan bersih antara Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja terdiri atas Usaha Kecil (UK) yang merupakan entitas usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha dengan tenaga kerja sebanyak 20 sampai 99 orang.

Selanjutnya menurut Bank Indonesia (BI) pengertian UMKM adalah perusahaan atau industri yang memiliki karakteristik antara lain:

- a. Total modal kurang dari Rp. 20.000.000
- b. Satu putaran dari usahanya memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000
- c. Jumlah Aset maksimum Rp. 600.000.000 di luar tanah dan bangunan.
- d. Jumlah omzet pertahun \leq Rp. 1.000.000.000

Dengan perbedaan pengertian tentang UMKM di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan unit usaha masyarakat sektor menengah ke bawah dengan berbagai potensi dan hambatan yang dihadapi.

2.1.2 Kriteria UMKM

Dalam UU No. 20 tahun 2008 telah ditetapkan kriteria UMKM dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Kriteria usaha mikro
 - a. Kekayaan bersih yang dimiliki paling besar adalah Rp.50.000.000 dari jumlah tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Hasil penjualan yang didapatkan pertahunnya paling besar adalah Rp.300.000.000.
2. Kriteria usaha kecil
 - a. Kekayaan bersih yang dimiliki jumlahnya lebih dari Rp.50.000.000 sampai Rp.500.000.000 dari jumlah tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b. Hasil penjualan yang didapatkan pertahun jumlahnya lebih dari Rp.300.000.000 sampai paling banyak sebesar Rp.2.500.000.000.

3. Kriteria usaha menengah
 - a. Kekayaan bersih yang dimiliki jumlahnya lebih dari Rp.500.000.000 sampai Rp.10.000.000.000 dari jumlah tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 - b. Hasil penjualan yang didapatkan pertahun jumlahnya lebih dari Rp.2.500.000.000 sampai paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000.

2.1.3 Hambatan UMKM

Menurut Beik (2016, hal. 132) terdapat beberapa masalah dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

- a. Modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan masih terbatas.
- b. Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha masih rendah.
- c. Terbatasnya kemampuan dalam pemasaran.
- d. Rendahnya akses informasi usaha.
- e. Antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), belum terjalin suatu kemitraan yang baik serta saling menguntungkan.

Kesimpulan menurut penulis adalah yang menjadi masalah utama dan yang paling sering menjadi hambatan keberadaan UMKM yakni kurangnya modal untuk membangun atau mengembangkan usaha. Modal tersebut mempengaruhi kegiatan UMKM dan bahkan keterbatasan modal dapat menimbulkan permasalahan lain seperti kekurangan fasilitas teknologi dan kesulitan menyediakan bahan baku.

2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.2.1 Pengertian BPRS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan menurut Roy (2020, hal. 21) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan yang termasuk ke dalam Perbankan Syariah. Dan dalam kegiatannya juga hampir sama dengan bank lainnya seperti menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2.2.2 Kegiatan dan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bagian dari Bank Syariah yang kegiatannya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tercantum bahwa Perbankan Syariah melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan tiga prinsip yaitu prinsip Syariah, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 21 menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan tabungan atau dapat dipersamakan dengan hal tersebut berdasarkan akad *wadi'ah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama islam atau prinsip syariah;
 2. Investasi deposito, tabungan atau bentuk lainnya dapat dipersamakan dengan hal tersebut berdasarkan akad *mudharabah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama islam prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Berupa pembiayaan bagi hasil yang didasarkan pada akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Berupa pembiayaan yang didasarkan pada akad *murabahah*, salam, atau *istishna'*;
 3. Berupa pembiayaan yang didasarkan pada akad *qardh*;
 4. Berupa pembiayaan penyewaan barang bergerak dan barang tidak bergerak kepada Nasabah yang didasarkan pada akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. Berupa pengambilalihan utang yang didasarkan pada akad *hawalah*;
 6. Penempatan dana oleh Bank Syariah lain dalam bentuk titipan didasari oleh akad *wadi'ah* atau Investasi yang didasari oleh akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariat islam atau prinsip syariah;
 7. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

8. Penyediaan produk atau pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah dan persetujuan dari Bank Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam mengoperasikan kegiatan perbankannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Melakukan serta menerima simpanan berupa giro serta ikut dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melaksanakan kegiatan usaha dalam valas kecuali kegiatan penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melaksanakan kegiatan usaha perasuransian, kecuali menjadi agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali oleh lembaga yang dibentuk dengan fungsi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang dimaksud dalam Pasal 21 UU No.1 tahun 2008.

Selain itu terdapat tujuan serta fungsi dari kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah di atur dalam pasal 3 Undang-undang No.21 Tahun 2008 berbunyi perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan menurut Sumitro (2004, hal. 129-130) mengatakan bahwa tujuan didirikannya BPRS adalah:

1. Sebagai peningkat kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan bawah yang biasanya tinggal di daerah perdesaan.
2. Mengurangi tingkat arus urbanisasi melalui penambahan lapangan pekerjaan terutama pada tingkat kecamatan.
3. Membangun ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi tujuannya untuk meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Maka dapat disimpulkan bahwa terbentuknya BPRS sebagai bank pembiayaan syariah menjadi solusi masyarakat dalam hal permodalan usaha terutama masyarakat ekonomi lemah. Masyarakat dapat menjalankan dan mengembangkan usaha melalui modal pembiayaan yang diberikan untuk menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu kehadiran BPRS di daerah kecamatan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga menyerap tenaga kerja yang ahli dalam bidang teknis perbankan maupun sejenisnya. Sehingga angkatan kerja tidak perlu berpindah dari desa ke kota atau melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.3.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kasmir (2015, hal. 59) dalam kegiatan operasional bank, sumber dana pihak ketiga adalah sumber dana utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bank untuk mampu membiayai kegiatan dari sumber dana yang tersebut. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang paling dominan dan yang relatif mudah untuk dihimpun.

Selanjutnya Umam dan Utomo (2017, hal. 77) menyatakan bahwa minimal ada dua macam kegiatan perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*defisit unit*).

Dana pihak ketiga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :

1. Simpanan tabungan

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998, simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan diwaktu tertentu berdasarkan syarat yang telah disepakati, namun penarikannya tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro dan atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal itu.

Selanjutnya dijelaskan kembali pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa tabungan pada perbankan syariah merupakan simpanan yang berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana, akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan waktu dan syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Simpanan deposito

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang kegiatan penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu yang telah disepakati sesuai perjanjian nasabah pemilik dana dengan bank.

Kemudian dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan kembali secara khusus bahwa deposito merupakan investasi dana dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya berdasarkan prinsip syariah yang penarikannya dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak perbankan.

Menurut Umam dan Utomo (2017, hal. 95) deposito merupakan produk perbankan yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dalam perbankan syariah akan menggunakan prinsip *mudharabah* dengan imbalan bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Sedangkan menurut Kasmir (2012, hal. 74) secara umum deposito adalah simpanan yang dikeluarkan bank sebagai simpanan jenis ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana utama bagi bank untuk dapat mengoperasikan kegiatan perbankan. Dan yang termasuk kedalam sumber DPK pada BPRS adalah simpanan tabungan dan simpanan deposito berdasarkan akad *wadiah*, akad *mudharabah* dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan tabungan giro tidak termasuk kedalam sumber DPK pada BPRS dikarenakan dalam operasional kegiatannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang melakukan dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti giro, kliring dan inkaso.

2.3.2 Jumlah Uang Beredar (JUB)

Pengertian JUB menurut Boediono (2014, hal. 86) adalah seluruh uang kartal dan seluruh uang giral yang tersedia untuk kemudian digunakan oleh masyarakat. Uang kartal merupakan uang tunai yang dikeluarkan dan telah disahkan oleh pemerintah atau bank sentral yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral merupakan bagian dari jumlah uang beredar berupa seluruh nilai saldo rekening koran yang dimiliki masyarakat pada bank umum.

Menurut Luwihadi dan Arka (2017, hal. 536) jumlah uang beredar adalah keseluruhan nilai uang yang berada di tangan masyarakat terdiri atas uang giral dan uang kartal. Pengertian jumlah uang beredar terdiri atas pengertian dalam arti sempit dan dalam arti yang luas.

Sedangkan menurut Nopirin (2018, hal. 3-157) definisi M1 adalah uang kertas dan uang logam yang ditambah dengan simpanan berbentuk rekening koran, M2 adalah jumlah M1 ditambah tabungan dan deposito berjangka pada bank-bank umum, selanjutnya definisi M3 yaitu jumlah M2 ditambah dengan deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan nonbank. Kebanyakan uang kertas yang beredar ditangan masyarakat merupakan saat ini adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. Perubahan jumlah uang beredar ditentukan oleh interaksi antara masyarakat, bank sentral serta lembaga keuangan.

Selanjutnya pengertian menurut Bank Indonesia (BI) jumlah uang beredar adalah kewajiban sistem keuangan (Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR) kepada sektor swasta domestik (bukan pemerintah pusat maupun penduduk). Uang beredar dapat diartikan dalam dua pembagian yaitu dalam arti sempit (M1) dan

pengertian secara luas (M2). Makna uang beredar dalam arti sempit (M1) adalah uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang berada ditangan masyarakat dan uang giral. Pengertian uang beredar secara luas (M2) yaitu kewajiban sistem keuangan (moneter) yang terdiri atas uang beredar dalam arti sempit M1 ditambah dengan uang kuasi.

Melalui penjelasan uang beredar diatas dapat disimpulkan bahwa uang beredar tidak hanya keseluruhan nilai uang yang sedang dipegang oleh masyarakat namun uang beredar juga merupakan jumlah uang yang berada dalam perekonomian baik dalam bentuk kartal, giro maupun kuasi.

2.3.3 *Non Performing Financing (NPF)*

Poetry dan Sanrego (2011, hal. 80-84) *Non Performing Financing (NPF)* merupakan pendeteksi yang mampu meramalkan kerugian yang akan muncul akibat dari resiko kredit bermasalah pada pembiayaan. Terdapat perbedaan penyebutan resiko kredit bermasalah, dalam ruang lingkup bank konvensional rasio kredit bermasalah lebih dikenal dengan sebutan *Non Performing Loan (NPL)*. Sedangkan dalam bank syariah, rasio antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan disebut sebagai *Non Performing Financing (NPF)*. Dampak yang akan disebabkan oleh NPF adalah penurunan tingkat bagi hasil pada pembiayaan perbankan. Hal ini akan merugikan pihak perbankan. Terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah dari perspektif bank antara lain sebagai berikut :

1. Kegagalan usaha debitur
2. Tingginya suku bunga kredit dan penurunan kegiatan ekonomi

3. Pemanfaatan persaingan perbankan oleh debitur secara tidak sehat
4. Debitur mengalami musibah

Kemudian, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa yang termasuk kedalam kategori *Non Performing Financing* (NPF) yaitu jumlah kredit ataupun jumlah pembiayaan yang kualitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga Dengan Pembiayaan UMKM

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifai dkk (2017, hal. 19) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan simpanan masyarakat sebagai salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan.

Menurut Destiana (2016, hal. 16) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada Bank Syariah di Indonesia.

Kemudian menurut Husaeni (2017, hal. 49) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.5 Hubungan Jumlah Uang Beredar Dengan Pembiayaan UMKM

Menurut Rifai dkk (2017, hal. 18) kenaikan jumlah uang beredar direspon oleh perbankan syariah sebagai peningkatan pembiayaan. Dikarenakan kenaikan jumlah uang beredar dapat meningkatkan jumlah simpanan oleh masyarakat atau jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Namun jika peningkatan jumlah dana pihak ketiga tidak langsung disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, maka bank syariah akan mengalami kerugian sebagai akibat

dari kewajiban memberikan nisbah dana masyarakat yang telah dihimpun tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian Lie dan Malelak (2015, hal. 67-72) menjelaskan bahwa secara parsial dan secara simultan variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan di Indonesia.

2.6 Hubungan *Non Performing Financing* Dengan Pembiayaan UMKM

Menurut Ryad dan Yuliawati (2017, hal. 1.537) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara NPF dengan pembiayaan bank syariah, jika NPF semakin rendah maka jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank akan semakin rendah, dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian Roy (2020, hal. 21) menyatakan bahwa jumlah pembiayaan tidak lancar (NPF) UMKM berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM.

Menurut Nugroho dkk (2017, hal. 146) menjelaskan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan modal kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selanjutnya menurut Effendi dan Yasmin (2017, hal. 498) juga menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan modal kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Roy (2020)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Non Lancar UMKM Dan Aktiva Produktif Yang Dihapus Terhadap Jumlah Pembiayaan UMKM BPRS Di Indonesia.	Regresi linier berganda	Pembiayaan Tidak Lancar UMKM Berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan UMKM. Sedangkan Asset Yang Dihapus Tidak Pengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan UMKM. Hasil uji bersama pembiayaan tidak lancar dan asset dihapus memiliki pengaruh signifikan terhadap pendanaan BPRS UMKM Di Indonesia
2	Nugroho dkk (2017)	Analisis Pengaruh Kinerja dan Kondisi Makroekonomi terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi BPRS Di Indonesia (Periode: 2011-2015)	Vector Error Correction Model	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan modal kerja BPRS. Sedangkan NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan modal kerja BPRS
3	Husaeni (2017)	Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.	Regresi linier berganda	Secara simultan DPK, CAR, FDR, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan BPRS.

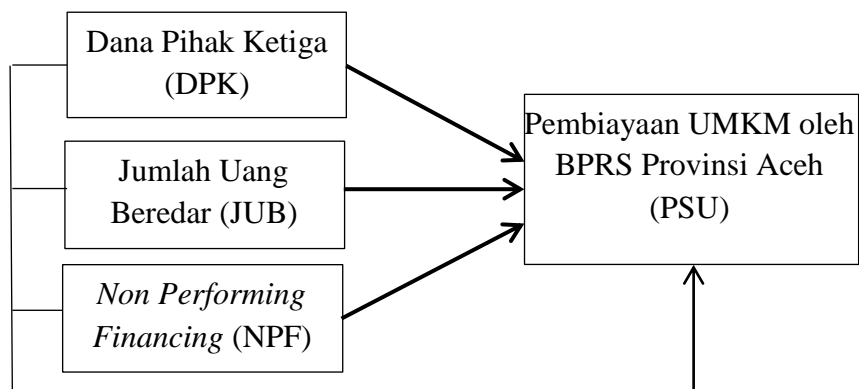
4.	Rifai dkk (2017)	Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variable Moderating	Regresi linier berganda	Secara Simultan variabel Kurs Rupiah, Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Berpengaruh Signifikan Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia
5	Ryad dan Yuliawati (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Capital Adequary Ratio (CAR) Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah.	Regresi linier berganda	Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. Secara simultan DPK, CAR, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
11	Effendi dan Yasmin (2017)	The Effect of Internal and External Factors of Banking to the SMEs Financing for BPRS in Indonesia	Vector Error Correction Model	DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UKM. Sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UKM oleh BPRS.
6	Asri dan Syaichu (2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014).	Regresi linier berganda	NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan.

7	Destiana (2016)	Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia	Regresi linier berganda	Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan Permodalan Dan Profitabilitas Tidak Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pembiayaan UMKM Pada Bank Syariah Di Indonesia
8	Lie dan Malelak (2015)	Pengaruh Makroekonomi terhadap Kredit Perbankan di Indonesia Periode 2007-2014	Regresi linier Berganda	Secara parsial dan simultan variabel Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap kredit perbankan di Indonesia.
9	Annisa dan Yahya (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Regresi linier berganda	Variabel DPK dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

10	Barus (2013)	Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga dan Rasio Keuangan terhadap Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum Umum Indonesia	Regresi linier berganda	Secara simultan dan parsoal, spread CAR, LDR dan NPL berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada bank umum. Secara parsial, variabel independen CAR, LDR, dan NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM.
11	Meydhiana wati (2007)	Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di Indonesia (2002-2006)	Regresi linier berganda	Variabel DPK, ROA dan CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penawaran kredit. Sedangkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penawaran kredit sektor UMKM.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori dan penejelasan hubungan antar variabel pada penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis dalam skripsi ini adalah :

- a. Diduga bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh
- b. Diduga bahwa Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh
- c. Diduga bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh
- d. Diduga bahwa Jumlah Uang Beredar (JUB), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian ini mencakup tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), *Non Performing Financing* (NPF), dan Pembiayaan UMKM BPRS Provinsi Aceh dalam periode tahun 2016-2020.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk runtun waktu (*time series*) dalam kurun waktu 2016-2020 dengan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) tentang dana pihak ketiga, jumlah uang beredar, dan *non performing financing* tahun 2016-2020.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam kurun waktu 5 tahun (60 bulan) dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020, serta data dari berbagai sumber lain seperti jurnal dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Model Analisis Data

Model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, analisis koefisien, Uji signifikan parameter individual (Uji t), Uji signifikan simultan (Uji F). Kemudian data akan diolah menggunakan aplikasi *software E-views*.

3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Siregar (2015, hal. 226) analisis regresi linier berganda adalah bentuk pengembangan dari analisis regresi linier sederhana yang merupakan alat untuk memprediksi permintaan masa yang akan datang melalui penggunaan data masa lalu berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen

Analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut ini :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots(3.1)$$

Selanjutnya karena satuan dari variabel penelitian yang digunakan berbeda persamaan tersebut ditransformasikan dalam bentuk semi logaritma sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots(3.2)$$

Kemudian agar mudah dipahami maka notasi variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan (3.2) dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{LogPSU} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogDPK} + \beta_2 \text{LogJUB} + \beta_3 \text{NPF} + \mu \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan :

PSU = Pembiayaan Sektor UMKM (variabel terikat)

β_0 = Konstanta (*Intercept*)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

- DPK = Dana pihak ketiga (variabel bebas)
- JUB = Jumlah uang beredar (variabel bebas)
- NPF = *Non performing financing* (variabel bebas)
- Log = Logaritma natural
- M = *Error Term*

3.3.2 Analisis Koefisien

a. Koefisien Korelasi (β)

Menurut Sugiyono (2013, hal. 250) dalam pemberian penafsiran untuk besar atau kecilnya koefisien korelasi, dapat dilihat berdasarkan ketentuan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Penentuan Kekuatan Hubungan Berdasarkan Tingkat Korelasi

Interprestasi Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono((2013, hal. 250)

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015, hal. 233) Koefisien determinasi atau disebut juga dengan koefisien penentu atau kemampuan menerangkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh satu atau lebih variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat.

Rumus koefisien determinasi adalah:

$$KD = (r)^2 \times 100 \% \dots\dots\dots (3.4)$$

3.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015, hal. 224) uji signifikansi parsial individual atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.

3.3.4 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2015, hal. 241) uji F atau uji signifikansi simultan digunakan untuk melihat kemampuan dari satu atau lebih variabel bebas dalam menjelaskan menjelaskan tingkah laku variabel terikat (Y) dan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas mempunyai koefisien regresi sama dengan nol.

3.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. $H_0 : \beta_1 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh atau berpengaruh negatif antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.
 $H_1 : \beta_1 > 0$ artinya terdapat pengaruh atau berpengaruh positif antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.
- b. $H_0 : \beta_2 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh atau berpengaruh negatif antara Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.
 $H_1 : \beta_2 > 0$ artinya terdapat pengaruh positif antara Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

b. $H_0 : \beta_3 \geq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh atau berpengaruh positif antara dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

$H_1 : \beta_3 < 0$ artinya terdapat pengaruh negatif antara dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

c. $H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh nyata antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

$H_1 : \beta_1; \beta_2; \beta_3 \neq 0$ artinya terdapat pengaruh nyata antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

Kriteria pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dalam penelitian ini adalah :

- a. Apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel terikat pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.
- b. Apabila $-t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel terikat pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

Kriteria pengujian hipotesis secara simultan (uji F) dalam penelitian ini adalah :

- a. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Dana Pihak Ketiga (DPK),

Jumlah Uang Beredar (JUB) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel terikat pembiayaan UMKM oleh BPRS (Y) Provinsi Aceh.

- b. Apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap variabel terikat pembiayaan UMKM oleh BPRS (Y) Provinsi Aceh.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik menurut Gujarati (2013) adalah untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan valid dengan penggunaan data secara teori tidak bias, bersifat konsisten serta penaksiran atas koefisien regresinya efisien.

3.5.1 Uji Normalitas

Menurut Sujarweni (2018, hal. 187) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai nilai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik kolmogorof. Diasumsikan jika :

1. $Sig > 0,05$ maka data bernilai distribusi normal
2. $Sig < 0,05$ maka data bernilai tidak berdistribusi normal

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Sujarweni (2018, hal. 188) uji multikolinieritas digunakan dalam model regresi untuk mengetahui apakah terdapat kemiripan antara variabel

independen dengan variabel independen yang lain sehingga kemiripan tersebut mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Jika hasil VIF bernilai 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sujarweni (2018, hal. 188-189) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variasi dari residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lain di dalam model regresi dengan cara prediksi melalui pola gambar *Scatterplot*. Heteroskedastisitas tidak terjadi pada suatu regresi jika titik-titik data menyebar di sekitar angka nol.

3.5.4 Uji Autokorelasi

Menurut Sujarweni (2018, hal. 189) uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel pengganggu dengan variabel sebelumnya pada periode tertentu dalam model regresi. Korelasi tersebut biasanya lebih sering terjadi pada data *time series* dibandingkan dengan data *crosssection*. Cara untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan melalui nilai Durbin Watson dengan kriteria :

1. Jika angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif
2. Jika angka D-W di antara -2 berarti tidak terdapat autokorelasi
3. Jika angka D-W di atas -2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan variabel secara operasional yang didasarkan pada karakteristik pengamatan dan dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan observasi maupun pengukuran yang

cermat pada suatu objek penelitian. Maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

- a. Pembiayaan UMKM (Y) adalah total modal kerja yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada pelaku kegiatan UMKM di Provinsi Aceh dimulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 yang diukur dalam satuan rupiah.
- b. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan besaran dana yang diperoleh oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh dimulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan maupun deposito yang akan digunakan sebagai sumber dana operasional perbankan yang diukur dalam satuan rupiah.
- c. Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah jumlah uang yang beredar dalam arti sempit (M1) yang merupakan jumlah uang yang keluar dari Bank Indonesia di Provinsi Aceh yang kemudian beredar ditangan masyarakat mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 yang diukur dalam satuan rupiah.
- d. *Non Performing Financing* (NPF) adalah jumlah rasio kredit bermasalah yang berasal dari pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh dimulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 yang diukur dalam satuan persen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah lahirnya perbankan syariah sebagai lembaga keuangan mikro di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah awal syariah, dan BPRS Amanah Rabbaniyah di Bandung pada tahun 1991. Sedangkan pendirian BPRS pertama di Aceh bernama BPRS Hareukat. Kemudian Pada tahun 1992 berdiri dan beroperasi Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah dengan sistem perbankan multinasional.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menjadi landasan hukum pertama bagi perbankan syariah yang memperbolehkan bank dengan sistem bagi hasil. Namun belum disebutkan secara rinci landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha apa yang diperbolehkan. Sehingga pada tahun 1998, DPR dan pemerintah melakukan penyempurnaan UU No.7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998 yang menjelaskan secara tegas bahwa sistem perbankan di tanah air terbagi atas dua sistem yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Selanjutnya peraturan dan pengawasan kegiatan BPRS diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang dan peran yang sangat strategis untuk lembaga yang mengatur dan mengawasi bank termasuk BPRS agar terciptanya praktek perbankan yang tumbuh sehat dan wajar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya, ketentuan hingga kebijakan mulai dari penetapan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank

Indonesia atau PBI hingga pendirian Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia untuk pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian disebutkan bahwa bentuk hukum BPRS dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Perusahaan Daerah yang tertuang dalam Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004. Untuk kegiatan usaha baik secara teknis maupun operasional BPRS mengenai produk-produknya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dalam PBI No.10/16/PBI/2008. Hingga pertengahan bulan Juli tahun 2008 lahirlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan secara khusus mengatur eksistensi perbankan syariah dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan Perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan secara signifikan dan turut mengambil peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan konvensional maupun syariah berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah terus disempurnakan oleh OJK agar mencapai sasaran pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan landasan hukum perbankan syariah salah satunya BPRS di Provinsi Aceh memiliki naungan yang lebih kuat semenjak lahirnya Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang disahkan pada Januari tahun 2019. Qanun tersebut merupakan tindak lanjut dan hasil

pertimbangan pemerintah Aceh atas Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang menyatakan secara tegas mewajibkan lembaga keuangan dan transaksi keuangan di Aceh berdasarkan prinsip syariah, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun. Sehingga dapat mewujudkan perekonomian masyarakat aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat islam serta pertimbangan terhadap kebutuhan masyarakat Aceh akan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.

Dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Desember 2020, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai 163 BPRS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan total komposisi pembiayaan yang telah disalurkan per Desember 2020 mencapai Rp.10.681.499.000. Dengan jumlah pembiayaan sektor UMKM mencapai Rp.469.297.000. Sedangkan di Provinsi Aceh total BPRS per Desember 2020 adalah 10 unit BPRS. Dengan jumlah pembiayaan sektor UMKM sebesar Rp. 167.601.000.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif variabel pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh dalam kurun waktu 5 tahun, dimulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020.

Tabel 4.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), *Non Performing Financing* (NPF), Dan Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS
Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Tahun	Pembiayaan Sektor UMKM (Rp)	Dana Pihak Ketiga (Rp)	Jumlah Uang Beredar (Rp)	NPF (%)
1	Jan-2016	64.637	105.476	160.448	8,8
2	Feb-2016	74.152	111.977	63.556	8,63
3	Mar-2016	76.207	111.303	383.919	8,19
4	Apr-2016	79.409	109.882	448.142	8,17
5	Mei-2016	79.995	108.783	665.147	7,69
6	Jun-2016	82.908	111.815	1.559.247	7,71
7	Jul-2016	82.669	117.130	434.316	8,36
8	Agu-2016	84.002	122.943	403.889	8,23
9	Sep-2016	85.392	123.654	629.481	7,85
10	Okt-2016	85.946	111.815	310.693	7,71
11	Nov-2016	87.662	134.317	523.399	8,01
12	Des-2016	76.333	112.867	1.120.129	5,81
13	Jan-2017	78.200	117.484	121.394	7,08
14	Feb-2017	80.298	115.752	176.768	9,89
15	Mar-017	80.626	117.705	402.123	9,59
16	Apr-2017	99.451	148.325	483.513	9,99
17	Mei-2017	102.738	150.608	706.934	11
18	Jun-2017	104.051	150.624	1.245.981	10,04
19	Jul-2017	102.818	162.193	195.050	11,46
20	Agu-2017	104.695	164.462	895.602	11
21	Sep-2017	107.518	165.919	226.804	11,25
22	Okt-2017	109.444	168.010	403.146	10,84
23	Nov-2017	109.393	167.621	412.062	10,58
24	Des-2017	102.901	171.853	1.614.953	10,63
25	Jan-2018	102.944	176.002	79.362	11,83
26	Feb-2018	106.712	178.860	103.704	12,14
27	Mar-2018	109.828	183.040	483.253	11,48
28	Apr-2018	113.396	184.528	357.794	11,86
29	Mei-2018	116.252	184.988	943.151	12,24
30	Jun-2018	116.250	187.059	1.023.085	11,62
31	Jul-2018	117.446	192.125	251.514	11,79
32	Agu-2018	108.904	193.265	653.351	11,39
33	Sep-2018	118.785	196.242	674.803	10,84
34	Okt-2018	119.291	197.880	428.663	10,26
35	Nov-2018	119.288	204.062	334.676	10,14
36	Des-2018	118.456	210.641	1.558.456	8,56

No.	Bulan	Pembiayaan Sektor UMKM (Rp)	Dana Pihak Ketiga (Rp)	Jumlah Uang Beredar (Rp)	NPF
37	Jan-2019	115.450	213.410	52.589	9,91
38	Feb-2019	117.751	209.069	428.612	10,36
39	Mar-2019	120.420	217.373	443.960	10,41
40	Apr-2019	125.349	216.762	678.347	10,56
41	Mei-2019	129.401	208.159	1.985.557	10,84
42	Jun-2019	130.419	216.671	98.580	10,91
43	Jul-2019	134.733	221.419	513.682	10,5
44	Agu- 2019	135.149	221.307	776.769	11,29
45	Sep-2019	139.533	225.796	325.164	9,55
46	Okt-2019	132.899	220.326	402.206	7,77
47	Nov-2019	136.662	219.857	621.045	8,11
48	Des-2019	129.055	230.120	1.615.679	6,29
49	Jan-2020	132.602	241.053	122.071	7,16
50	Feb-2020	139.449	245.912	262.170	7,89
51	Mar-2020	145.355	242.056	755.838	8,51
52	Apr-2020	144.245	240.803	844.347	8,53
53	Mei-2020	141.926	241.164	920.511	8,02
54	Jun-2020	159.543	251.701	283.315	7,36
55	Jul-2020	92.572	126.896	1.080.900	6,18
56	Agu-2020	96.522	126.275	455.588	6,06
57	Sep-2020	176.480	259.943	500.272	7,51
58	Okt-2020	176.901	269.194	604.914	7,08
59	Nov-2020	173.335	278.525	551.577	6,64
60	Dese-2020	167.601	279.963	1.287.949	5,44

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Tahun 2020

4.2.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana utama dalam operasional perbankan yang bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang menjadi tolak ukur pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat salah satunya sektor UMKM. Adapun sumber dana pihak ketiga yaitu simpanan tabungan, simpanan deposito dan simpanan giro. Namun, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sumber dana pihak ketiga hanya berasal dari dua sumber yaitu simpanan tabungan dan simpanan deposito. Hal ini dikarenakan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan tidak melakukan penghimpunan dana dalam bentuk giro. Berikut ini merupakan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Aceh :

Tabel 4.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

No.	Bulan	DPK (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	105.476	117.484	176.002	213.410	241.053
2	Februari	111.977	115.752	178.860	209.069	245.912
3	Maret	111.303	117.705	183.040	217.373	242.056
4	April	109.882	148.325	184.528	216.762	240.803
5	Mei	108.783	150.608	184.988	208.159	241.164
6	Juni	111.815	150.624	187.059	216.671	251.701
7	Juli	117.130	162.193	192.125	221.419	126.896
8	Agustus	122.943	164.462	193.265	221.307	126.275
9	September	123.654	165.919	196.242	225.796	259.943
10	Oktober	111.815	168.010	197.880	220.326	269.194
11	November	134.317	167.621	204.062	219.857	278.525
12	Desember	112.867	171.853	210.641	230.120	279.963
Rata-rata		115.113,5	150.046,33	190.724,33	218.355,75	233.623,75

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020

Tabel 4.2 menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun BPRS di Provinsi Aceh memiliki jumlah rata -rata DPK terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 115.113.500. Sedangkan jumlah rata-rata DPK tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 233.623.750 Peningkatan jumlah DPK pertahun ini disebabkan mulai berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib berdasarkan prinsip syariah yang mendorong masyarakat Provinsi Aceh menyimpan dana pada perbankan syariah salah satunya BPRS. Adanya revolusi digital pada BPRS mengakibatkan masyarakat tertarik dan mulai

menggemari eksistensi BPRS. Selain itu situasi pandemi juga menjadi sebab peningkatan DPK pada BPRS karena masyarakat cenderung tidak melakukan transaksi penarikan dana dan memilih tetap dirumah serta tetap menyimpan dananya di BPRS sebagai motif berjaga-jaga mengingat pandemi COVID -19 tidak terdeteksi kapan akan berakhir. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan rata-rata DPK pada BPRS Provinsi Aceh tahun 2016-2020 cenderung meningkat meskipun peningkatan yang terjadi cenderung lambat karena adanya pengalihan dana masyarakat ke instrumen investasi lainnya.

4.2.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) Provinsi Aceh

Jumlah Uang Beredar (JUB) merupakan keseluruhan uang yang berada dalam perekonomian suatu negara pada periode tertentu. Dalam arti yang sempit (M1) jumlah uang beredar merupakan jumlah uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang kemudian beredar ditangan masyarakat ditambah dengan jumlah uang giral berbentuk saldo rekening koran yang terdapat pada bank umum. Sedangkan dalam arti yang luas (M2) jumlah uang beredar merupakan jumlah keseluruhan dari uang kartal, uang giral serta uang kuasi yang terdapat dalam perekonomian. Adapun perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) Provinsi Aceh Tahun 2016-2020
(dalam jutaan rupiah)

No.	Bulan	JUB (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	160.448	121.394	79.362	52.589	122.071
2	Februari	63.556	176.768	103.704	428.612	262.170
3	Maret	383.919	402.123	483.253	443.960	755.838
4	April	448.142	483.513	357.794	678.347	844.347
5	Mei	665.147	706.934	943.151	1.985.557	920.511
6	Juni	1.559.247	1.245.981	1.023.085	98.580	283.315
7	Juli	434.316	195.050	251.514	513.682	1.080.900
8	Agustus	403.889	895.602	653.351	776.769	455.588
9	September	629.481	226.804	674.803	325.164	500.272
10	Oktober	310.693	403.146	428.663	402.206	604.914
11	November	523.399	412.062	334.676	621.045	551.577
12	Desember	1.120.129	1.614.953	1.558.456	1.615.679	1.287.949
	Rata-rata	558.530,5	573.694,17	574.317,67	661.849,17	639.121

Sumber : Bank Indonesia (BI) Tahun 2020

Tabel 4.3 menyatakan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun BPRS di Provinsi Aceh memiliki jumlah rata -rata JUB terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 558.530.500. Sedangkan jumlah rata-rata JUB tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 639.121.000. Kenaikan dan penurunan ini disebabkan oleh kebutuhan transaksi masyarakat yang berubah-ubah serta pola musiman yang terjadi. Pada saat perayaan dihari tertentu mengakibatkan jumlah uang beredar tinggi karena banyak yang melakukan transaksi sebagai bentuk pola musiman seperti saat menjelang pemilu, lebaran, perayaan akhir tahun dan libur sekolah. Hal ini menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah JUB yang terjadi selama 5 (lima) periode berfluktuatif.

4.2.3 Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator dalam memprediksi jumlah kerugian yang mungkin saja muncul akibat resiko kredit bermasalah pada kegiatan pembiayaan perbankan syariah termasuk BPRS. Kategori *Non Performing Financing* (NPF) meliputi pembiayaan dengan kualitas yang kurang lancar, macet atau diragukan. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dapat dilakukan melalui perhitungan persentase dari jumlah pembiayaan bermasalah yang telah dibagi dengan jumlah pembiayaan. Adapun data NPF periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 (dalam persen)

No.	Bulan	NPF (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	8,8	7,08	11,83	9,91	7,16
2	Februari	8,63	9,89	12,14	10,36	7,89
3	Maret	8,19	9,59	11,48	10,41	8,51
4	April	8,17	9,99	11,86	10,56	8,53
5	Mei	7,69	11	12,24	10,84	8,02
6	Juni	7,71	10,04	11,62	10,91	7,36
7	Juli	8,36	11,46	11,79	10,5	6,18
8	Agustus	8,23	11	11,39	11,29	6,06
9	September	7,85	11,25	10,84	9,55	7,51
10	Oktober	7,71	10,84	10,26	7,77	7,08
11	November	8,01	10,58	10,14	8,11	6,64
12	Desember	5,81	10,63	8,56	6,29	5,44
Rata-rata		7,93	10,28	11,18	9,71	7,20

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020

Tabel 4.4 menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun BPRS di Provinsi Aceh memiliki jumlah rata -rata NPF terendah terjadi pada tahun 2020

sebesar 7,20 persen Sedangkan jumlah rata-rata NPF tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,18 persen. Hal ini menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah NPF yang terjadi selama 5 (lima) periode cenderung meningkat.

4.2.4 Perkembangan Pembiayaan Sektor UMKM Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan pertujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lainnya.

Tabel 4.5
Perkembangan Pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh Tahun 2016-2020
(dalam jutaan rupiah)

No.	Bulan	PSU (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	64.637	78.200	102.944	115.450	132.602
2	Februari	74.152	80.298	106.712	117.751	139.449
3	Maret	76.207	80.626	109.828	120.420	145.355
4	April	79.409	99.451	113.396	125.349	144.245
5	Mei	79.995	102.738	116.252	129.401	141.926
6	Juni	82.908	104.051	116.250	130.419	159.543
7	Juli	82.669	102.818	117.446	134.733	92.572
8	Agustus	84.002	104.695	108.904	135.149	96.522
9	September	85.392	107.518	118.785	139.533	176.480
10	Oktober	85.946	109.444	119.291	132.899	176.901
11	November	87.662	109.393	119.288	136.662	173.335
12	Desember	76.333	102.901	118.456	129.055	167.601
	Rata-rata	79.942,67	98.511,08	113.962.67	128.901,75	145.544,25

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020.

Tabel 4.5 menyatakan jumlah pembiayaan perbulan mulai tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda. Kenaikan dan penurunan pembiayaan sektor UMKM ini selaras dengan sumber utama pembiayaan yaitu jumlah DPK yang perbulannya mengalami fluktuasi mulai tahun 2016-2020. Sedangkan, jika dilihat dari rata-rata pertahun jumlah pembiayaan terendah yang disalurkan oleh BPRS Provinsi Aceh selama 5 tahun terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 79.942.667. Sedangkan rata-rata jumlah pembiayaan tertinggi BPRS terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.145.544.250. Hal ini menyatakan bahwa BPRS terus mengupayakan peningkatan penyaluran jumlah pembiayaan sektor UMKM dan melakukan konsolidasi guna memperbaiki kualitas pembiayaan serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sesuai dengan visi misi

pemerintah Indonesia masa kepemimpinan Joko Widodo untuk meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM selama masa pandemi.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Bagian ini akan membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh yang menggunakan model analisis regresi linier berganda dan diolah dengan program E-views. Dari penelitian ini diperoleh hasil akhir sebagai berikut:

Tabel 4.6
Deskriptif Statistik

	LOGPSU	LOGDPK	LOGJUB	NPF	C
Mean	3.708832	3.800389	3.996952	4.236297	1.000000
Std. Dev.	0.058501	0.072966	0.422831	1.107889	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan E-views (data diolah 30 Juni 2021)

Tabel 4.6 dapat menyimpulkan bahwa variabel pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh tahun 2016-2020 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,709 dengan standar deviasi 0,058. Pada tahun yang sama nilai rata-rata variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,800 dengan standar deviasi 0,073. Selanjutnya nilai rata-rata variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) sebesar 3,997 dengan standar deviasi 0,423. Kemudian untuk rata-rata variabel *Non Performing Financing* (NPF) adalah 4,236 dengan standar deviasi 1,108. Dengan jumlah sampel 60 bulan (5 tahun).

4.3.1 Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7
Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.775999	0.122380	6.340912	0.0000
LOGDPK	0.771541	0.031602	24.41415	0.0000
LOGJUB	0.002503	0.005621	0.445238	0.6579
NPF	-0.002201	0.002161	-1.018831	0.3127
R-squared	0.916056	Mean dependent var		3.708832
Adjusted R-squared	0.911478	S.D. dependent var		0.058501
S.E. of regression	0.017406	Akaike info criterion		-5.198649
Sum squared resid	0.016663	Schwarz criterion		-5.057799
Log likelihood	157.3602	Hannan-Quinn criter.		-5.143667
F-statistic	200.0675	Durbin-Watson stat		1.642194
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan E-views (data diolah 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil dari pengolahan data maka diperoleh persamaan regresi linier berganda akhir estimasi sebagai berikut:

$$\text{LogPSU} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogDPK} + \beta_2 \text{LogJUB} + \beta_3 \text{NPF} + \mu \dots \dots \dots (4.1)$$

$$\text{LogPSU} = 0,776 + 0,771 \text{LogDPK} + 0,002 \text{LogJUB} - 0,002 \text{NPF} + \mu \dots \dots \dots (4.2)$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 0,776. Nilai konstanta ini menyatakan bahwa jika variabel bebas yaitu DPK, JUB, dan NPF sama dengan nol, maka tingkat pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh adalah sebesar 0,776.
2. Koefisien regresi variabel DPK bernilai positif yakni sebesar 0,771 artinya bahwa setiap peningkatan variabel DPK sebesar 1 persen, maka pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh akan naik sebesar 0,771 persen.

3. Koefisien regresi variabel JUB bernilai positif yakni sebesar 0,022 persen artinya bahwa setiap peningkatan variabel JUB sebesar 1 persen, maka pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh akan naik sebesar 0,022 persen.
4. Koefisien regresi variabel NPF bernilai negatif yakni sebesar -0,022 persen artinya bahwa setiap peningkatan variabel NPF sebesar 1 persen, maka pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh akan turun sebesar 0,022 persen.

4.3.2 Koefisien Korelasi

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa nilai koefisien korelasi dari variabel DPK, JUB, dan NPF diperoleh R sebesar 0,911 atau 91,1 persen. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat keeratan antara variabel DPK, JUB, dan NPF terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh dengan keeratan sebesar 91,1 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,916 atau 91,6 persen artinya variasi perubahan pada pembiayaan UMKM dipengaruhi oleh DPK, JUB, dan NPF sebesar 91,6 persen. Sedangkan sisanya sebesar 8,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.

4.3.4 Uji t

Uji t dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau individu variabel independen (DPK, JUB, dan NPF) dengan variabel dependen

yaitu pembiayaan sektor UMKM pada BPRS Provinsi Aceh. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada derajat kesalahan 5%.

Hasil uji t pada Tabel 4.7 menjelaskan pengaruh masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.7 diketahui bahwa hasil koefisien regresi variabel DPK sebesar 0,771. Nilai signifikansi untuk pengaruh DPK terhadap pembiayaan sektor UMKM sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan nilai t_{hitung} 24,414 dan t_{tabel} 1,672 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) maka H_0 ditolak H_1 diterima. Artinya DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan jumlah DPK akan meningkatkan jumlah pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh BPRS Provinsi Aceh dikarenakan DPK merupakan sumber dana utama perbankan untuk dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

2. Variabel Jumlah Uang Beredar (JUB)

Hasil estimasi pada Tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil koefisien regresi variabel JUB sebesar 0,002. Nilai signifikansi menunjukkan untuk pengaruh JUB terhadap pembiayaan sektor UMKM sebesar $0,658 > 0,05$ dengan nilai t_{hitung} 0,445 dan t_{tabel} 1,672 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) maka H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya JUB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena JUB bukanlah faktor internal melainkan

faktor eksternal perbankan yang tidak secara langsung mempengaruhi pembiayaan sehingga peningkatan JUB menjadikan jumlah pembiayaan UMKM juga meningkat namun tidak signifikan.

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Tabel 4.7 menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel NPF adalah sebesar -0,002. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh NPF terhadap pembiayaan UMKM adalah sebesar $0,313 > 0,05$ dengan nilai $t_{hitung} - 1,019$ dan $t_{tabel} 1,672$ ($t_{hitung} < t_{tabel}$) maka H_0 diterima H_1 ditolak. Artinya NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh. Hal ini menyatakan bahwa semakin meningkat NPF maka semakin menurun jumlah pembiayaan yang akan disalurkan BPRS. Tingginya nilai NPF pada pembiayaan akan merugikan pihak perbankan karena mempengaruhi besaran bagi hasil yang didapatkan pihak BPRS. Namun pada penelitian ini NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan karena NPF bukanlah faktor utama yang menjadi pertimbangan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan, dan kebijakan pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM juga menjadi alasan perbankan tetap memberikan pembiayaan pada UMKM. Alasan lainnya adalah NPF yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jumlah keseluruhan NPF pada pembiayaan BPRS tidak terkhusus untuk pembiayaan UMKM saja.

4.3.5 Uji F

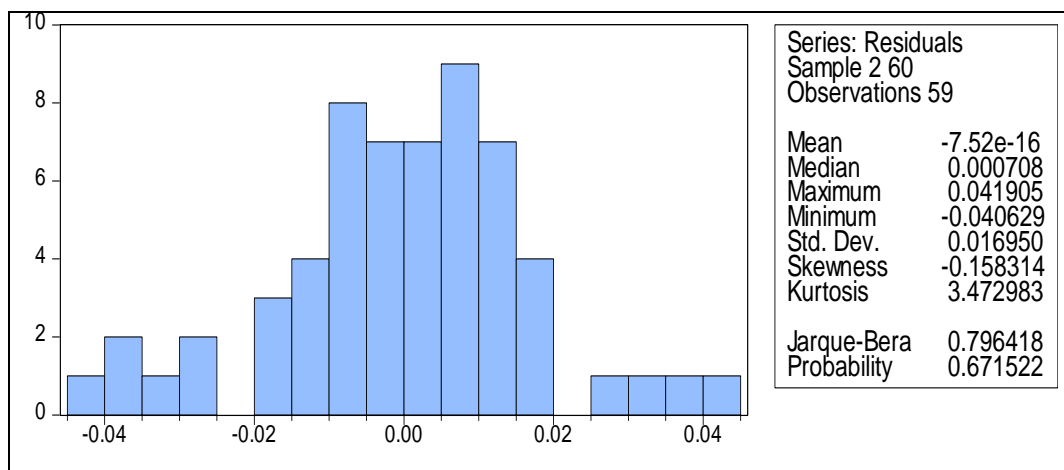
Hasil uji F pada Tabel 4.7 memiliki penjelasan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $200,067 > 2,77$ dengan derajat signifikan 0,0000 pada tingkat nyata $\alpha = 0,05$ atau 5%

(derajat signifikansi). Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara DPK, JUB dan NPF terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

4.3.6 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu uji asumsi statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti terdistribusi normal atau tidak. Sebuah model regresi dikatakan baik apabila data tersebut terdistribusi normal dengan melihat grafik atau histogram *probability plot*. Hasil uji normalitas yang didapatkan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan E-views (data diolah 30 Juni)

Hasil estimasi Grafik 4.1 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas adalah $0,671 > 0,05$. Maka kesimpulannya adalah data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen pada model regresi dalam

penelitian ini. Suatu model regresi dikatakan baik apabila dalam model regresi tersebut tidak terjadi kolerasi antar variabel independen dengan melihat nilai VIF (*Variance-Inflating-Factor*). Jika $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Sedangkan jika $VIF > 10$, maka terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikorelasi

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.014977	2916.673	NA
LOGDPK	0.000999	2810.072	1.017949
LOGJUB	3.16E-05	99.38166	1.081450
NPF	4.67E-06	17.41179	1.096931

Sumber: Hasil Pengolahan E-views (data diolah 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil estimasi uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas karena nilai $VIF < 10$ yaitu nilai DPK sebesar $1,018 < 10$, kemudian JUB memiliki nilai sebesar $1,081 < 10$ dan nilai NPF sebesar $1,097 < 10$.

c. Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah varians data bersifat homogen atau heterogen. Penggunaan data dalam analisis regresi linier berganda yang baik adalah data yang memiliki varians bersifat homegen (nilai varians yang sama). Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	2.346687	Prob. F(3,55)	0.0827
Obs*R-squared	6.695087	Prob. Chi-Square(3)	0.0823
Scaled explained SS	7.193971	Prob. Chi-Square(3)	0.0660

Sumber: Hasil Pengolahan E-views (data diolah 30 Juni 2021)

Hasil pengujian Tabel 4.9 memperoleh nilai obs R-squared sebesar 6,695 dengan probabilitas sebesar 0,082. Artinya $0,082 > 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antar anggota dari serangkaian pengamatan data *cross section* ataupun *time series* dengan melihat nilai Durbin-Wattson (DW). Adapun hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.173308	Prob. F(2,53)	0.3172
Obs*R-squared	2.501515	Prob. Chi-Square(2)	0.2863

Sumber: Hasil Pengolahan E-views (data diolah 30 Juni 2021)

Tabel 4.10 menyimpulkan bahwa dengan jumlah observasi 60 bulan atau 5 tahun diperoleh hasil estimasi dengan nilai obs R-square sebesar 2,501 dengan probabilitas sebesar 0,286. Maka dapat disimpulkan $0,286 > 0,05$ dan tidak terjadi autokorelasi pada data penelitian ini.

4.4 Pembahasan dan Hasil

4.4.1 Analisis Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian ini, DPK secara individual atau parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh, dimana nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan derajat signifikan yaitu $0,0000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara DPK terhadap pembiayaan sektor

UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh. Pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila jumlah DPK meningkat akan menyebabkan peningkatan pada pembiayaan UMKM. Hal ini dikarenakan apabila jumlah sumber dana yang dihimpun oleh bank meningkat maka kemampuan bank untuk membiayai kegiatan UMKM akan lebih banyak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Ryad dan Yuliawati (2017) berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Capital Adequary Ratio (CAR) Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah” yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

4.4.2 Analisis Pengaruh JUB Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian ini, JUB secara parsial atau individual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh, dimana nilai signifikan lebih besar dibandingkan dengan derajat signifikan yaitu $0,658 > 0,05$. Maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara JUB dengan pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh. Penyebab hasil JUB tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM karena BPRS Provinsi Aceh belum maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi dan menjadikan JUB menjadi DPK yang akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan dan juga karena objek pada penelitian ini berbeda dengan objek penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifai, Susanti dan Setyaningrum (2017) dengan objek penelitian perbankan

syariah (BUS, UUS, dan BPRS) sedangkan pada penelitian ini objek penelitian dikhususkan hanya pada BPRS saja. Pengaruh yang tidak signifikan menunjukkan bahwa tingginya JUB tidak menyebabkan jumlah pembiayaan sektor UMKM Provinsi Aceh meningkat.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rifai, Susanti dan Setyaningrum (2017) berjudul “Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating” yang menyatakan bahwa JUB berpengaruh signifikan.

4.4.3 Analisis Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BPRS Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian ini NPF secara individual atau parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh, dimana nilai signifikan lebih besar dibandingkan dengan derajat signifikan yaitu $0,313 > 0,05$. Maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara NPF dengan pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa apabila NPF meningkat maka jumlah pembiayaan sektor UMKM akan menurun. Jumlah NPF yang tinggi akan merugikan pihak perbankan. Dana yang tidak kembali ke bank akan mengurangi kemampuan perbankan mendanai kegiatan sektor UMKM dan persentase bagi hasil menjadi berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Asri dan Syaichu (2016, hal. 1-15) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014” yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

4.5 Kebijakan-Kebijakan Makro Ekonomi

Kebijakan makroekonomi merupakan ketentuan yang dilakukan pemerintah dalam suatu negara dengan tujuan menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif (sehat) pada negara tersebut

4.5.1 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral untuk mengendalikan dan menciptakan perekonomian yang stabil pada suatu negara dengan mengatur jumlah uang beredar. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral adalah menaikkan tingkat suku bunga atau tingkat bagi hasil sehingga masyarakat akan tertarik untuk menabung. Hal ini akan menambah jumlah DPK sekaligus mengurangi JUB. Persentase bagi hasil yang tinggi akan mengurangi permintaan masyarakat untuk pembiayaan sehingga tingkat NPF pun menjadi rendah. Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah kebijakan pasar terbuka dengan menjual surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Reverse Repo*-Sertifikat Bank Negara Syariah (RR-SBNS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS). melalui kebijakan ini masyarakat akan membeli surat-surat berharga tersebut dengan uangnya sehingga JUB di masyarakat akan berkurang.

Namun ketika pemerintah ingin meningkatkan penyaluran pembiayaan maka kebijakan moneter yang harus dilakukan BPRS adalah membeli surat-surat berharga seperti SBIS, FASBIS, dan RR-SBNS yang akan menaikkan jumlah

uang beredar serta menurunkan tingkat persentase bagi hasil sehingga memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan untuk modal usaha terutama UMKM.

4.5.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara melalui perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah dengan instrumen utamanya adalah pajak dan pengeluaran. Kebijakan fiskal melalui penurunan pajak dan menurunkan pengeluaran belanja negara akan menyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan menurunkan harga-harga barang sehingga menguntungkan sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya karena bertambahnya pendapatan. Ketika pendapatan UMKM meningkat maka kemampuan UMKM dalam menyetorkan angsuran pembiayaan kepada perbankan ikut meningkat. Selanjutnya setoran tersebut kembali menjadi sumber dana perbankan yang akan disalurkan kepada pihak defisit unit dalam bentuk pembiayaan dan secara tidak langsung mengurangi resiko besaran NPF pada pembiayaan.

4.5.3 Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menaikkan tingkat efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga mampu menawarkan barang dengan mutu yang lebih baik tetapi dengan harga yang lebih murah. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui perbaikan pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM sehingga memberikan keterampilan yang lebih

baik kepada tenaga kerja. Kebijakan lainnya yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong kemajuan teknologi sehingga produktivitas dan produksi meningkat yang selanjutnya meningkatkan pendapatan pengusaha khususnya pelaku UMKM.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Aceh maka dapat disimpulkan bahwa :

4. Pada variabel DPK secara individu atau parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.
5. Pada variabel JUB secara individu atau parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.
6. Pada variabel NPF secara individu atau parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.
7. Secara bersamaan atau simultan variabel DPK, JUB, dan NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

5.2 Saran

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kepustakaan pihak kampus dan menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pembiayaan UMKM oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel Jumlah Uang Beredar dalam arti yang luas (M2), menambah variabel lain terutama variabel yang merupakan faktor eksternal dari perbankan seperti inflasi,

menambah dan memperbaharui periode penelitian atau dapat pula menambahkan Variabel moderating pada penelitian.

2. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Aceh

Karena variabel DPK dalam penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan UMKM maka sebaiknya BPRS dapat mengelola dan menambah jumlah DPK dengan baik untuk meningkatkan jumlah pembiayaan. Peningkatan fungsi intermediasi pada jumlah uang beredar juga perlu dilakukan pihak perbankan agar JUB menjadi faktor eksternal dalam peningkatan pembiayaan. Meskipun jumlah NPF tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan UMKM namun NPF yang tinggi akan berpengaruh terhadap kesehatan perbankan dan menurunkan tingkat bagi hasil yang dapat merugikan pihak perbankan. Untuk itu diharapkan BPRS lebih memperhatikan variabel dalam penelitian ini dan menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan sektor UMKM dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

3. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah lebih memperhatikan kriteria calon penerima bantuan UMKM agar dana pembiayaan UMKM tepat sasaran dan mampu mengembalikan dana pinjaman (angsuran) pembiayaan. Kebijakan bantuan UMKM yang tidak tepat sasaran akan mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat. Dalam kondisi ini apabila pihak perbankan tidak mampu menarik atau memanfaatkan jumlah uang yang beredar dari tangan masyarakat menjadi

sumber dana pihak ketiga untuk pembiayaan maka yang akan terjadi adalah timbulnya masalah inflasi.

4. Bagi Masyarakat Pelaku UMKM

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat terutama pelaku UMKM dan nasabah BPRS sebelum melakukan permohonan pembiayaan usaha pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, L.N dan Yahya, Y. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Fonancing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol.4(1)*, 15.
- Asri, A.S dan Syaichu. (2016). *Diponegoro Journal Of Management Vol. 5 No. 3* , 1-15.
- Barus, A.C dan Marya Lu. (2013). Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga dan Rasio Keuangan Terhadap Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum di Indonesia. *JWEM Vol.3(1)*.
- Beik, I. S. dan Arsyanti, L.D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boediono. (2014). *Ekonomi Moneter Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Destiana Rina. (2016). Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *JRKA Vol.2(1)*, 15-28.
- Effendi, J. dan Yasmin, N. (2017). The Effect of Internal and External Factors of Banking to the SMEs Financing for BPRS in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 21(3)*, 498.
- Husaeni, U. A . (2017). Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia . *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.7(1)*, 49.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (2019). Jakarta.
- Lie, W. dan Malelak, M.I. (2015). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Kredit Perbankan Di Indonesia Periode 2007-2014. *FINESTA Vol.3(2)*.

- Luwihadi, N.L.G.A dan Arka, S. (2017). Determinan Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia Periode 1984-2014. *Jurnal EP Unud, Vol.6(4)*, 536.
- Meydhianawati, L. (2007). Meydianawathi, L. G. 20Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). *Buletin Studi Ekonomi Vol.12(2)*.
- Mutia, R. (2017). Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh. *Seminar Naional II USM Vol.1*, 375-378.
- Nopirin. (2018). *Ph.D.* Yogyakarta: BPFE.
- Nugroho, A. A. (2017). Nugroho, A., Alexandi, M.F., Widyastutik Analisis Pengaruh Kinerja dan Kondisi Makroekonomi terhadap Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi BPRS di Indonesia (Periode: 2011-2015). *Jurnal Al-Muzara'ah Vol.5(2)*, 146.
- Poetry, Z.D dan Sanrego, Y.D. (2011). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *TAZKIA: Islamic Finance & Business Review*, 80.
- Rifai, S.A. Susanti, H, Setyaningrum, A. (2017). Rifai, Syukuri Ahmad; Susanti, Helmi; Setyaningrum, Aisyah. 2017. Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variable Moderating. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 8(1)*, 15.
- Roy, M.I. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Non Lancar UMKM Dan Aktiva Produktif Yang Dihapus Terhadap Jumlah Pembiayaan UMKM BPRS Di Indonesia. *Banque Syar'I: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah Vol.5(1)*, 17.
- Ryad, A.M. dan Yuliawati, Y. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.5(3)*, 1.537.
- Siregar, S. (2015). *Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi* . Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

- Suharyadi dan Purwanto. (2015). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V.W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi : Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. dan Utomo, S.B. (2017). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10, Tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
- Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

LAMPIRAN 1

Data Log Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah Uang Beredar (JUB), *Non Performing Financing* (NPF), dan pembiayaan sektor UMKM oleh BPRS Provinsi Aceh.

Bulan	PSU	DPK	JUB	NPF
Januari 2016	7,810481191	8,023153652	8,20533431	8,8
Februari 2016	7,870122869	8,049128828	7,80315656	8,63
Maret 2016	7,881994865	8,04650687	8,58423961	8,19
April 2016	7,899869727	8,040926556	8,65141565	8,17
Mei 2016	7,903062843	8,036561032	8,82291764	7,69
Juni 2016	7,918596439	8,048500068	9,19291492	7,71
Juli 2016	7,917342684	8,068668143	8,63780583	8,36
Agustus 2016	7,924289626	8,089703806	8,60626203	8,23
September 2016	7,931417185	8,09220817	8,79898263	7,85
Oktober 2016	7,934225669	8,048500068	8,49233147	7,71
November 2016	7,942811375	8,128130983	8,71883289	8,01
Desember 2016	7,882712331	8,052566982	9,04926804	5,81
Januari 2017	7,893206753	8,069978725	8,08419722	7,08
Februari 2017	7,904704728	8,063528504	8,24740365	9,89
Maret 2017	7,906475114	8,070794912	8,60435891	9,59
April 2017	7,997609154	8,171214357	8,68440816	9,99
Mei 2017	8,011731107	8,177848041	8,84937887	11
Juni 2017	8,017246258	8,177894177	9,09551142	10
Juli 2017	8,012069152	8,210032107	8,29014595	11,5
Agustus 2017	8,019925941	8,216065567	8,95211505	11
September 2017	8,031481177	8,219896122	8,35565071	11,3
Oktober 2017	8,039191957	8,225335132	8,60546236	10,8
November 2017	8,038989533	8,224328427	8,61496257	10,6
Desember 2017	8,012419595	8,235157118	9,20815989	10,6
Januari 2018	8,012601039	8,245517603	7,8996126	11,8
Februari 2018	8,02821326	8,252513226	8,01579551	12,1
Maret 2018	8,040713075	8,262546007	8,68417456	11,5
April 2018	8,054597735	8,266062275	8,55363305	11,9
Mei 2018	8,065400433	8,267143557	8,97458123	12,2
Juni 2018	8,065392962	8,271978608	9,00991172	11,6
Juli 2018	8,06983823	8,283583881	8,40056216	11,8
Agustus 2018	8,037043832	8,286153211	8,81514656	11,4
September 2018	8,074761602	8,292791961	8,829177	10,8
Oktober 2018	8,076607679	8,296401902	8,632116	10,3
November 2018	8,076596757	8,309762139	8,52462457	10,1

Bulan	PSU	DPK	JUB	NPF
Desember 2018	8,073557063	8,323542908	9,19269455	8,56
Januari 2019	8,062393937	8,329214766	7,72089491	9,91
Februari 2019	8,070964604	8,320289642	8,63206433	10,4
Maret 2019	8,080698623	8,337205599	8,64734384	10,4
April 2019	8,098120874	8,335983149	8,83145191	10,6
Mei 2019	8,111937633	8,318395193	9,29788236	10,8
Juni 2019	8,115340866	8,335800788	7,99378881	10,9
Juli 2019	8,12947398	8,345214885	8,71069435	10,5
Agustus 2019	8,130812837	8,344995151	8,89029189	11,3
September 2019	8,144676932	8,353716244	8,51210246	9,55
Oktober 2019	8,123521713	8,34306575	8,60444854	7,77
November 2019	8,135647772	8,342140298	8,79312307	8,11
Desember 2019	8,110774835	8,361954365	9,20835508	6,29
Januari 2020	8,122550074	8,382112541	8,0866125	7,16
Februari 2020	8,144415404	8,390779722	8,41858299	7,89
Maret 2020	8,162429975	8,383915852	8,87842872	8,51
April 2020	8,159100768	8,381661893	8,92652096	8,53
Mei 2020	8,152061963	8,382312479	8,96402898	8,02
Juni 2020	8,202877754	8,400884941	8,45226957	7,36
Juli 2020	7,966479647	8,103447933	9,03378552	6,18
Agustus 2020	7,984626312	8,101317377	8,65857228	6,06
September 2020	8,246695495	8,414878127	8,6992062	7,51
Oktober 2020	8,247730288	8,430065376	8,78169364	7,08
November 2020	8,238886265	8,444864183	8,74160615	6,64
Desember 2020	8,224276606	8,447100639	9,10989867	5,44

LAMPIRAN 2

Data Log Setelah Rho Test, nilai rho = $1 - (\text{durbin watson} / 2)$

Bulan	LOGPSU	LOGDPK	LOGJUB	LOGNPF
Januari 2016	NA	NA	NA	NA
Februari 2016	3.656091	3.720353	3.376087	3.882088
Maret 2016	3.635784	3.703716	4.374160	3.533809
April 2016	3.647254	3.699550	4.019914	3.751204
Mei 2016	3.640803	3.698196	4.155172	3.281995
Juni 2016	3.654613	3.712490	4.432638	3.560972
Juli 2016	3.644979	3.726217	3.677902	4.200181
Agustus 2016	3.652602	3.736371	3.945859	3.719483
September 2016	3.655982	3.727526	4.155599	3.409623
Oktober 2016	3.654945	3.682466	3.744968	3.474646
November 2016	3.662015	3.785679	4.136919	3.850181
Desember 2016	3.597284	3.667152	4.345148	1.488321
Januari 2017	3.640204	3.725333	3.201796	3.945299
Februari 2017	3.646039	3.709488	3.885692	6.070089
Maret 2017	3.641606	3.720235	4.154592	4.253994
April 2017	3.731785	3.816734	4.042051	4.815855
Mei 2017	3.696737	3.769188	4.163832	5.610040
Juni 2017	3.694633	3.765655	4.320957	4.105109
Juli 2017	3.686480	3.797768	3.382795	6.043064
Agustus 2017	3.697130	3.786462	4.479287	4.816923
September 2017	3.704446	3.787037	3.525667	5.315110
Oktober 2017	3.705923	3.790409	4.097292	4.770226
November 2017	3.701560	3.786468	3.972010	4.731435
Desember 2017	3.675099	3.797840	4.560082	4.921714
Januari 2018	3.689616	3.802358	2.931483	6.094738
Februari 2018	3.705131	3.803764	3.753674	5.757295
Maret 2018	3.709207	3.810022	4.359368	4.930039
April 2018	3.716348	3.808125	3.868213	5.666132
Mei 2018	3.719659	3.807310	4.359593	5.841109
Juni 2018	3.713823	3.811561	4.167807	5.016085
Juli 2018	3.718272	3.820558	3.539395	5.520597
Agustus 2018	3.683080	3.816866	4.282745	5.028876
September 2018	3.738491	3.822118	4.073092	4.694691
Oktober 2018	3.719987	3.822146	3.868462	4.411435
November 2018	3.718980	3.833559	3.867292	4.604366
Desember 2018	3.715946	3.840131	4.593357	3.089110
Januari 2019	3.706423	3.838368	2.761110	5.291576
Februari 2019	3.721017	3.826383	4.466367	5.013203
Maret 2019	3.726127	3.848114	3.990039	4.820412
April 2019	3.738297	3.837765	4.165903	4.943435

Bulan	PSU	DPK	JUB	NPF
Mei 2019	3.742714	3.820836	4.533001	5.142505
Juni 2019	3.738663	3.847731	2.977251	5.061435
Juli 2019	3.750959	3.847754	4.397762	4.613668
Agustus 2019	3.744673	3.842455	4.190563	5.624877
September 2019	3.757815	3.851295	3.715474	3.458644
Oktober 2019	3.729179	3.835939	4.011867	2.617436
November 2019	3.752719	3.840760	4.150718	3.917809
Desember 2019	3.721304	3.861074	4.464153	1.914367
Januari 2020	3.746499	3.870541	3.118378	3.766322
Februari 2020	3.762011	3.868332	4.055568	4.026926
Maret 2020	3.768229	3.856792	4.336304	4.253065
April 2020	3.755180	3.858242	4.136293	3.938553
Mei 2020	3.749937	3.860108	4.147854	3.417762
Juni 2020	3.804551	3.878330	3.615858	3.032925
Juli 2020	3.540736	3.570872	4.473486	2.209019
Agustus 2020	3.686428	3.729220	3.784524	2.725671
September 2020	3.938706	4.043930	4.027599	4.240415
Oktober 2020	3.798345	3.889940	4.088163	3.028088
November 2020	3.788943	3.896545	4.003571	2.820089
Desember 2020	3.779105	3.890797	4.393492	1.857484

LAMPIRAN 3

1. Output Hasil Regresi

a. Deskriptif Statistik

	LOGPSU	LOGDPK	LOGJUB	NPF	C
Mean	3.708832	3.800389	3.996952	4.236297	1.000000
Median	3.713823	3.811561	4.088163	4.253065	1.000000
Maximum	3.938706	4.043930	4.593357	6.094738	1.000000
Minimum	3.540736	3.570872	2.761110	1.488321	1.000000
Std. Dev.	0.058501	0.072966	0.422831	1.107889	0.000000
Skewness	0.561630	-0.171462	-1.069977	-0.396526	NA
Kurtosis	6.284012	4.845821	3.751301	2.635527	NA
Jarque-Bera	29.61418	8.664772	12.64531	1.872685	NA
Probability	0.000000	0.013136	0.001795	0.392059	NA
Sum	218.8211	224.2230	235.8202	249.9415	60.00000
Sum Sq. Dev.	0.198499	0.308798	10.36959	71.19029	0.000000
Observations	59	59	59	59	60

b. Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LOGPSU

Method: Least Squares

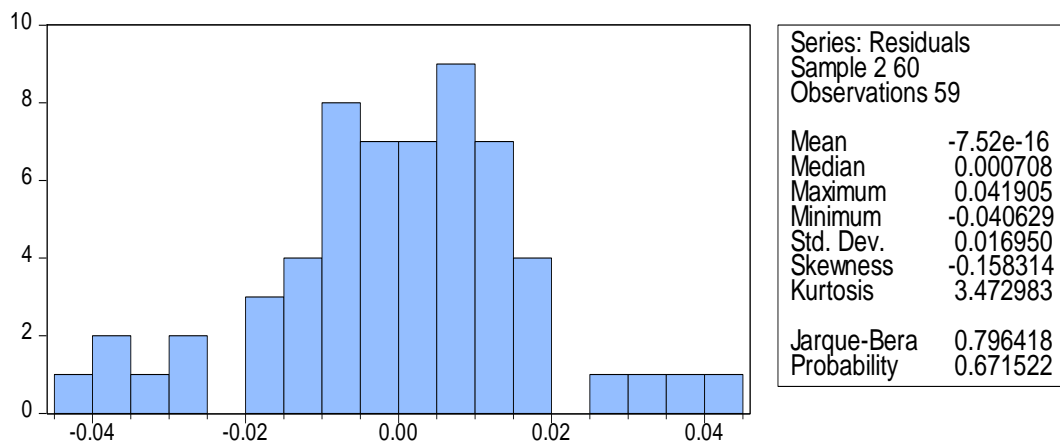
Date: 09/10/21 Time: 13:29

Sample (adjusted): 2 60

Included observations: 59 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.775999	0.122380	6.340912	0.0000
LOGDPK	0.771541	0.031602	24.41415	0.0000
LOGJUB	0.002503	0.005621	0.445238	0.6579
NPF	-0.002201	0.002161	-1.018831	0.3127
R-squared	0.916056	Mean dependent var		3.708832
Adjusted R-squared	0.911478	S.D. dependent var		0.058501
S.E. of regression	0.017406	Akaike info criterion		-5.198649
Sum squared resid	0.016663	Schwarz criterion		-5.057799
Log likelihood	157.3602	Hannan-Quinn criter.		-5.143667
F-statistic	200.0675	Durbin-Watson stat		1.642194
Prob(F-statistic)	0.000000			

c. Uji Normalitas (Histogram)



d. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 09/10/21 Time: 13:37

Sample: 1 60

Included observations: 59

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.014977	2916.673	NA
LOGDPK	0.000999	2810.072	1.017949
LOGJUB	3.16E-05	99.38166	1.081450
NPF	4.67E-06	17.41179	1.096931

e. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.346687	Prob. F(3,55)	0.0827
Obs*R-squared	6.695087	Prob. Chi-Square(3)	0.0823
Scaled explained SS	7.193971	Prob. Chi-Square(3)	0.0660

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 09/10/21 Time: 13:42

Sample: 2 60

Included observations: 59

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005583	0.003045	-1.833330	0.0722
LOGDPK	0.001658	0.000786	2.108633	0.0395
LOGJUB	-5.85E-06	0.000140	-0.041822	0.9668
NPF	-9.75E-05	5.38E-05	-1.813254	0.0753
R-squared	0.113476	Mean dependent var		0.000282
Adjusted R-squared	0.065120	S.D. dependent var		0.000448
S.E. of regression	0.000433	Akaike info criterion		-12.58579
Sum squared resid	1.03E-05	Schwarz criterion		-12.44494
Log likelihood	375.2808	Hannan-Quinn criter.		-12.53081
F-statistic	2.346687	Durbin-Watson stat		1.687489
Prob(F-statistic)	0.082690			

f. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.173308	Prob. F(2,53)	0.3172
Obs*R-squared	2.501515	Prob. Chi-Square(2)	0.2863

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/10/21 Time: 14:23

Sample: 2 60

Included observations: 59

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.013102	0.122298	0.107136	0.9151
LOGDPK	-0.003171	0.031600	-0.100345	0.9204
LOGJUB	-0.001313	0.005734	-0.228990	0.8198
NPF	0.000985	0.002323	0.424130	0.6732
RESID(-1)	0.177447	0.141175	1.256933	0.2143
RESID(-2)	0.103887	0.146146	0.710844	0.4803
R-squared	0.042399	Mean dependent var		-7.52E-16
Adjusted R-squared	-0.047941	S.D. dependent var		0.016950
S.E. of regression	0.017351	Akaike info criterion		-5.174176
Sum squared resid	0.015956	Schwarz criterion		-4.962901
Log likelihood	158.6382	Hannan-Quinn criter.		-5.091703
F-statistic	0.469323	Durbin-Watson stat		1.978747
Prob(F-statistic)	0.797385			

LAMPIRAN 4

Titik Persentase Distribusi t (df =46-90)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

LAMPIRAN 5

Titik Persentase Distribusi F, $\alpha=0,05$ (5%)

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

LAMPIRAN 6

Foto Penelitian



Lampiran 6.1

Foto Penelitian Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh



Lampiran 6.2

Foto Penelitian Pada Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh

Nomor : S-22/KO.05011/2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Penyampaian Data Penelitian
Mahasiswa Saudara

16 Juni 2021

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
Kampus UTU, Meulaboh Kab. Aceh Barat
Aceh

Menunjuk surat Saudara nomor 429/UN59.4/LT/2021 tanggal 21 April 2021
hal Izin Penelitian Skripsi dan proposal penelitian mahasiswa Saudara, yaitu:

Nama : Julia Nanda Kartrika
NIM : 1705906010013
Fakultas : Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Desa Lhok Sari Kecamatan Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat

terlampir kami sampaikan data-data penelitian dimaksud sesuai dengan kewenangan OJK. Adapun data terkait dengan jumlah uang yang beredar di Provinsi Aceh, bukan merupakan kewenangan dan data publikasi OJK.

Selanjutnya memperhatikan tingginya minat penelitian terhadap Lembaga Jasa Keuangan, bersama ini kami informasikan bahwa OJK menyediakan data statistik dan direktori Lembaga Jasa Keuangan dalam pengawasan OJK pada menu statistik di *website* OJK (www.ojk.go.id).

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala Bagian Pengawasan LJK

Adi Surahmat



BIODATA PENULIS

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Julia Nanda Kartika
NIM : 1705906010013
Tempat/Tanggal Lahir : Lhok Sari, 23 Juli 1999
Alamat : Lr. Pendidikan Desa Lhok Sari Kec. Pante
Ceureumen Kab. Aceh Barat
Agama : Islam
E-mail : julianandakartika18@gmail.com
Nomor HP : 0853 6010 8295

2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Karino
Nama Ibu : Saridah

3. PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri Sawang Rambot : Tahun 2005-2011
SMP Negeri 2 Pante Cereumen : Tahun 2011-2014
SMK Negeri 1 Meulaboh : Tahun 2014-2017
Universitas Teuku Umar : Tahun 2017-2021

4. PENGALAMAN ORGANISASI

UKM Kesenian : Tahun 2017-2018
BEMNUS Aceh Barat : Tahun 2018
HIMEP Universitas Teuku Umar : Tahun 2019-2020